

17/1983

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TK II YOGYAKARTA

=====



Arsip DPK Kota Yogyakarta

NOTA KEUANGAN

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1983/1984  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

=====

NOTA KEUANGAN

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1983/1984

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DALAM SIDANG PLENO DPRD KOTAMADYA YOGYAKARTA TGL.18 MEI 1983 JAM.09.00 WIB.

Saudara Pimpinan Sidang dan Pimpinan Dewan yang terhormat,  
Saudara Anggota Muspida yang terhormat,  
Saudara Anggota Dewan yang terhormat,  
Saudara Sekretaris Kotamadya, Saudara Sekretaris Dewan, Para Asisten  
Sekretaris, Kepala Dinas/Bagian dan para Camat serta rekan-rekan War-  
tawan dan hadlirin yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang  
Mahaesa atas Rakhmat dan KaruniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat ber-  
temu dalam rangka penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da-  
erah Tahun Anggaran 1983/1984 kepada DPRD yang terhormat, untuk selanjutnya  
agar dapat dipahami, dibahas dan disempurnakan.

Kami berharap agar pembahasannya dapat berjalan lancar sehingga paling lam-  
bat tanggal 26 Mei 1983 sudah dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984,  
karena tanggal tersebut merupakan batas terakhir.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum kami menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 marilah kita sejenak mengamati ta-  
hun kerja 1983/1984 sekarang ini, kecuali mewujudkan tahun terakhir Pelita  
III dan tahun yang menentukan bagi pelaksanaan Repelita IV yang telah dipo-  
lakan dalam GBHN-1983 itu, maka kita insyafi pula bahwa sekarang ini banyak  
kebijaksanaan-kebijaksanaan atau langkah-langkah baru yang ditempuh oleh  
Pemerintah. Seperti misalnya dalam operasi pemberantasan kejahatan, pembe-  
basan visa bagi wisatawan, devaluasi rupiah terhadap dollar Amerika, "pengen-  
cangan ikat pinggang" yang maknanya adalah peningkatan efektivitas dan efi-  
siensi dalam setiap kerja kita serta dalam setiap penggunaan uang Negara.  
Masih banyak lagi kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang saat ini harus kita  
laksanakan dengan sebaik-baiknya antara lain dibidang pendidikan, dibidang  
penertiban vidio casset, dibidang penggunaan kendaraan dinas dan dibidang  
kearsipan pola baru dilingkungan Pemerintahan Daerah.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan baru itu, jelas merupakan langkah positif dan  
bertujuan positif.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Menghadapi penyusunan RAPBD TA 1983/1984, kiranya kita sudah sepakat bulat  
untuk bersama-sama mengadakan penggarapan materi RAPBD sejak awal, dimulai  
dari kegiatan Komisi-komisi dengan Eksekutif demikian pula Panitia Anggaran  
dengan Eksekutif.

Akan tetapi karena kesibukan-kesibukan yang luar biasa, maka baru tanggal  
11 Mei 1983 Eksekutif berkesempatan menyampaikan Pra Rancangan APBD TA 1983  
/1984 kepada Panitia Anggaran DPRD.

Dengan sempitnya waktu tersebut maka dapatlah kami hayati bahwa Panitia Anggaran DPRD terpaksa harus bekerja keras, untuk mengejar waktu, didalam menyempurnakan Pra Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984. Untuk itu semua, kami minta ma'af dan berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak-bapak Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD dan juga staf Eksekutif.

Pagi ini, kami mendapat kesempatan untuk menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 dan untuk itu pula kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Dewan Cq Panitia musyawarah yang telah berhasil mengacarakan penyampaian Nota Keuangan ini.

Sidang Dewan yang kami hormati.

Untuk dapat mencapai suatu setiap Program dan Proyek Pembangunan yang merata dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat diperlukan adanya kemantapan disegala bidang baik Politik, Ekonomi Sosial Budaya maupun Keamanan, yang kesemuanya ini memerlukan adanya kesadaran, tekad, tanggung jawab dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan konstruktif. Pelaksanaan disiplin Anggaran yang mantab serta anggaran yang berimbang dan dinamis sebagaimana yang telah kita bina bersama, sejak Pelita pertama jelas akan mendorong kearah terselenggaranya kepentingan umum yang lebih mantap. Dengan demikian maka kepada segenap unsur Pemerintah Kota madya Dati II maupun masyarakat berkewajiban ikut berusaha, serta berbuat banyak, bagi kelangsungan dan suksesnya Pembangunan sesuai dengan kemampuan yang ada.

Suhubungan dengan hal tersebut kiranya dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

#### I. Dasar Hukum.

Sebagai dasar hukum untuk pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 ini adalah :

- a. Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 1975.
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 1975.
- c. Peraturan Mendagri No. 11 Tahun 1975.
- d. Surat Mendagri No. 903/2109/SJ tanggal 26 Pebruari 1983 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984.
- e. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 903/546 tanggal 2 April 1982 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984.

#### II. Kebijaksanaan Umum :

Dengan berlandaskan apa yang telah kami kemukakan dan berpegang pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk terakhir dari Departemen Dalam Negeri maupun Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, serta memperhatikan keinginan dan tuntutan masyarakat dan Daerah yang ada, maka kerangka umum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 tetap berpijak pada :

1. Kebijakan Anggaran yang berimbang dan dinamis.
2. Peningkatan kegiatan Pembangunan disegala bidang.
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
4. Penghematan disegala bidang khususnya belanja rutin.
5. Peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
6. Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 dikalangan masyarakat. sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Presiden.
7. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan.

Ini semua harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya demi suksesnya Program Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam GBHN, Tri Logi Pembangunan, Delapan Jalur pemerataan dan Program Kabinet Pembangunan IV.

Dalam hal ini kita harus dapat menemukan cara yang sebaik-baiknya untuk dapat mencapai sasaran secara keseluruhan dalam suatu kesatuan yang utuh dan serasi, serta wajib kita pelihara keseimbangan dan kelanjutan Program tahun sebelumnya, tahun yang sedang berjalan dan tahun-tahun yang akan datang.

Disamping itu dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 ini kami perhatikan pula :

1. Penyusunan dengan sistim Daftar Usulan Kegiatan ( DUK ) bagi Anggaran Rutin dan Daftar Usulan Peoyek ( DUP ) bagi Anggaran Pembangunan.
2. Pelaksanaan Manual Administrasi Keuangan Daerah ( MAKUDA ), dan Manual Administrasi Pendapatan Daerah ( MAPENDA ).
3. Saran Panitia Anggaran DPRD tersebut surat Pimpinan Dewan tanggal 9 April 1983 No. 747/Sek/DPRD/1983.
4. Meningkatkan kebutuhan rutin seimbang dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan meningkatnya pelayanan.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dalam pengetrapan dan penjabaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 ini dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, maka kegiatan pembangunan diarahkan untuk memelihara dan meningkatkan fungsi/predikat Kotamadya Yogyakarta sebagai Kota Kebudayaan, Kota Pendidikan, Kota Pariwisata, Kota Perjuangan serta Kota Transito Perdagangan, oleh karena itu perlu disediakan dana bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Untuk membina dan mengembangkan secara terus menerus nilai budaya Daerah sebagai kekayaan Nasional dengan meningkatkan kegiatan dan lomba dibidang seni budaya dari Tingkat RT/RK sampai tingkat Nasional/Pusat antara lain festival ketoprak, festival drama tari, pertunjukan rakyat, tukar-menukar misi kesenian, upacara tradisional, pentas seni Sabang Merauke dll.

RALAT RAPBD TA 1983/1984 HASIL PANITIA ANGGARAN DPRD

PENDAPATAN.

Folio	Ayat	Semula	Menjadi	Lebih	Kurang
<u>RUTIN :</u>					
8	104	291.000	561.000	270.000	-
9	122	UP	9.174.000	9.174.000	-
10	150	4.000.000	4.300.000	300.000	-
<u>PEMBANGUNAN</u>					
2P	002	216.000.000	232.800.000	16.800.000	-
3P	031	UP	722.670.000	722.670.000	-
4P	046	722.670.000	-	-	722.670.000

BELANJA RUTIN.

Folio	Pasal	Semula	Menjadi	Lebih	Kurang
17	2.2.1. 1004a	2.000.000	4.320.000	2.320.000	-
	1006a	19.000.000	23.000.000	4.000.000	-
19	2.2.1. 1053	2.100.000	4.100.000	2.700.000	-
24	2.2.3. 1074	4.614.700	4.139.630	-	475.070
25	2.2.3. 1020	3.993.000	3.093.000	-	900.000
	1023	8.522.280	7.200.000	-	1.322.280
	1024	21.123.600	12.720.000	-	8.403.600
26	1054	5.421.400	4.609.500	-	811.900
	1081	24.662.000	4.622.000	-	20.000.000
27	1083	16.106.000	18.540.000	2.434.000	-
26	1053	19.800.000	20.220.000	420.000	-
28	1099	4.300.000	4.000.000	-	300.000
50	2.2.4. 1055	12.170.500	11.057.000	-	1.113.500
	1081	106.699.560	89.720.240	-	16.979.320
55	2.2.6. 1100	-	4.540.000	4.540.000	-
58	2.2.8. 1014	409.600	384.600	-	25.000
68	2.3.1. 1051	16.770.000	12.900.000	-	3.870.000
69	2.3.1. 1083	30.126.600	27.616.000	-	2.510.600
	1100	1.200.000	1.000.000	-	200.000
70	2.3.2. 1081	100.000	-	-	100.000
	1082	131.341.700	121.606.000	-	9.735.700
73	2.3.5. 1083	2.845.000	2.545.000	-	300.000
	1084	3.587.500	2.485.000	-	1.102.500
81	2.5.2. 1081	25.620.000	23.100.000	-	2.520.000
	1082	20.870.000	20.598.320	-	271.680
	1083	36.078.200	32.639.600	-	3.438.600
101	2.10.1. 1053	-	900.000	900.000	-
106	2.14.1. 1139	UP	25.000.000	25.000.000	-
107	1148	623.350	893.350	270.000	-

BELANJA PEMBANGUNAN :

Folio	Pasal	Semula	Menjadi	Lebih	Kurang
5	2P.1.1.01.1.001	20.000.000	32.803.000	12.803.000	
6	003	275.976.000	308.306.530	32.330.530	
9	2P.1.2.02.1.003	-	600.000	600.000	
10	2P.1.2.11.1.001	-	722.670.000	722.670.000	
11	004	38.880.000	41.904.000	3.024.000	
16	2P.2.1.02.004	2.000.000	-		2.000.000
24	2P.2.2.02.1.003	2.000.000	7.500.000	5.500.000	
28	2P.3.1.01.1.002	2.700.000	-		2.700.000
	003	3.000.000	1.500.000		1.500.000
	004	4.250.000	6.250.000	2.000.000	
	005	2.000.000	-		2.000.000
	2P.3.1.01.2.001	26.750.000	33.250.000	6.500.000	
30	2P.3.1.01.2.006	18.900.000	36.500.000	17.600.000	
	007	UP	20.000.000	20.000.000	
	008	11.650.000	7.437.000		4.213.000
	010	-	3.000.000	3.000.000	
31	2P.3.1.02.1.001	14.549.000	13.549.000		1.000.000
32	2P.3.1.02.1.004	5.395.000	4.885.000		510.000
	005	4.143.370	1.400.000		2.743.370
34	2P.3.1.03.1.002	400.000	750.000	350.000	
36	2P.3.2.01.1.006	-	1.113.500	1.113.500	
	2P.3.2.01.4.001	27.113.800	37.083.800	9.970.000	
37	2P.3.2.01.4.002	18.500.000	7.750.000		10.750.000
38	2P.3.2.01.5.001	30.000.000	20.000.000		10.000.000
	2P.3.2.01.6.001	25.920.000	27.936.000	2.016.000	
39	2P.3.2.03.1.002	1.000.000	500.000		500.000
	003	1.000.000	500.000		500.000
40	004	3.000.000	1.500.000		1.500.000
	006	3.000.000	1.000.000		2.000.000
	007	4.000.000	2.000.000		2.000.000
	008	2.000.000	1.420.000		580.000
41	009	2.000.000	1.380.000		620.000
	010	3.000.000	2.000.000		1.000.000
	012	3.000.000	2.570.000		430.000
42	013	2.000.000	1.000.000		1.000.000
	014	1.000.000	-		1.000.000
	015	800.000	-		800.000
	016	3.380.910	UP		3.380.910
	017	2.000.000	1.000.000		1.000.000
	018	3.000.000	1.500.000		1.500.000
43	019	3.000.000	2.500.000		500.000
	020	1.000.000	500.000		500.000
	021	3.000.000	1.500.000		1.500.000
	022	4.000.000	2.000.000		2.000.000
	023	2.240.000	1.500.000		740.000
	024	-	500.000	500.000	
51	2P.6.1.10.01.001	722.670.000	-		722.670.000

- b. Untuk menunjang pelaksanaan sistim pendidikan yang bersifat formal dan non formal dengan pembangunan sarana pendidikan serta sarana kegiatan remaja dan olah raga antara lain kegiatan pertandingan olah raga di Kecamatan/Pordes, PKKJK, PAKKGGK, PAKKM SD, bantuan untuk KONE, pemeliharaan tempat-tempat olah raga dan lain-lain.
- c. Untuk pemeliharaan predikat Kota Pariwisata perlu diusahakan:
- 1) Terciptanya suasana bersih, indah dan nyaman dengan peningkatan kegiatan kebersihan dan keindahan dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat serta pemeliharaan/Pembangunan Taman serta Penghijauan Kota ( Pekan Penghijauan Nasional ), pengadaan gerobag sampah, Pembuatan Bak Sampah dan lain-lain.
  - 2) Terciptanya suasana aman dan tenteram dengan meningkatkan sistim keamanan terpadu serta kesadaran masyarakat tentang arti penting dan manfaatnya Sistim Keamanan Lingkungan dan Sistim Keamanan Swakarsa, peningkatan penerangan jalan dan tempat-tempat umum.
  - 3) Menunjang sarana transportasi dan ketertiban lalu lintas dengan pengadaan Terminal pembantu, Perbaikan/Upgrading jalan dan saluran air hujan, Assainering dan lain-lain.
- d. Memelihara dan menyelamatkan benda-benda/tempat-tempat bersejarah dan bernilai sejarah Perjuangan Nasional antara lain mempersiapkan Pembangunan Monumen Yogya Kembali.
- e. Mempersiapkan Pelaksanaan Festival Film Indonesia Tahun 1984 yang akan berlangsung di Yogyakarta.
- f. Menyambut adanya Gerhana Matahari Total yang akan datang.
2. Untuk lebih dapat menyebar luaskan P4 agar dapat dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat maka perlu adanya peningkatan pelaksanaan Penataran P4 dengan bekerja sama antara BP 7 dan Masyarakat, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden. Disamping itu pelaksanaan Pembangunan sarana perkantoran BP 7 perlu dilanjutkan.
  3. Dalam menyelenggarakan Pembangunan dibidang mental spiritual seperti tahun yang lalu masih tetap disediakan anggaran untuk bantuan tempat-tempat ibadah, bantuan pengembangan agama, kegiatan Majelis Keagamaan, bantuan penataran/peningkatan kesejahteraan Kaum/Chotib dan Mubaligh.
  4. Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga sehat sejahtera tetap diusahakan melalui berbagai Gerakan Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan Keluarga sejahtera lahir batin dalam tata kehidupan Masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  5. Masalah Pembinaan Generasi Muda perlu perhatian pembinaan melalui KNPI, Kepramukaan, Bakopar, Karang Taruna, Kursus-kursus Ke-trampilan, Pembinaan Panti Pemuda dan lain-lain.

6. Disamping meningkatkan peranan Kelurahan dalam Struktur Pemerintahan di Kotamadya Yogyakarta dengan memberikan bantuan dan penataran Perangkat Kelurahan, kepada RK pun masih tetap diberikan bantuan dana untuk peningkatan administrasi.
7. Dalam rangka menunjang kebijaksanaan Nasional dibidang Kependudukan perlu penyediaan dana bantuan untuk pemberangkatan Transmigrasi, dan bantuan kegiatan PKBI, PPKBD/APSARI, dalam rangka mensukseskan program KB.
8. Dalam rangka menunjang Program Nasional dibidang Swadaya Pangan perlu disediakan dana untuk pembinaan dan penyuluhan dibidang Pertanian dan penyelenggaraan Kegiatan Hari Pertasiganaling.
9. Untuk lebih dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat disediakan pula dana untuk peningkatan sarana Pemerintahan dan Perkantoran antara lain :  
Penyempurnaan dan pengembangan Kantor Balai Kota (Rehabilitasi Gedung PKK, penyelesaian gedung BP7, pembangunan Gedung DIPENDA, pembangunan sayap kiri DPRD, garasi mobil Dinas, Gudang barang), Pengadaan pesawat Facsimile, alat-alat perlengkapan Kantor, dan pengadaan mobil jenazah.
10. Penyediaan dana untuk inventarisasi dan pemeliharaan barang/inventaris Milik Daerah.
11. Untuk meningkatkan peranan dan aktifitas BAPPEDA disediakan dana untuk kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta penyusunan Repelita IV.
12. Penyediaan dana untuk pembinaan Karyawan dan HUT Kotamadya Yogyakarta.

### III. Masalah Pendapatan Daerah.

Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 ini kami selalu berusaha untuk dapat memenuhi harapan Pemerintah Atasan untuk setiap Tahun Anggaran harus selalu ada peningkatan pendapatan sebagai imbangan dari makin meningkatnya kebutuhan pelayanan Masyarakat.

Atas usaha tersebut dalam Tahun Anggaran ini dapat terlihat adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.052.187.860 atau sebesar 81,7 % dari tahun yang lalu.

Untuk dapat mencapai target tersebut kiranya masih perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memantapkan organisasi dan peningkatan sistem kerja Dinas Pendapatan Daerah.
2. Menambah dan meningkatkan mutu tenaga operasional agar lebih berwibawa dalam rangka intensifikasi Pelaksanaan Peraturan yang berlaku.
3. Penambahan sarana kerja pada Dipenda dan unit kerja lain yang mengelola Pendapatan Daerah.
4. Memberikan dorongan semangat kerja antara lain dengan cara meningkatkan prosentase insentip dari 3% menjadi 5% sesuai dengan SK Mendagri No.126/1979.
5. Memantapkan dasar hukum yang berkaitan dengan pendapatan Daerah.



#### IV. Masalah Pembangunan.

Dengan keberhasilan dibidang Pembangunan baik Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Program Pembangunan Daerah Tingkat II Program Bantuan Sarana Pendidikan, Program Bantuan Sarana Kesehatan, Program Bantuan Desa dan Pembangunan-pembangunan lainnya, berarti bahwa Proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya, yang hasilnya dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sesuai dengan sasaran masing-masing Program.

Sesuai dengan harapan Pemerintah untuk mengadakan penghematan agar dapat meningkatkan Tabungan Pemerintah demi berlanjut dan terdapatnya Program Pembangunan selanjutnya, maka dalam Tahun Anggaran 1983/1984 ini kami berusaha untuk dapat melaksanakan hal tersebut.

Dalam hal ini dapat kita lihat adanya peningkatan pendapatan pembangunan maupun belanja pembangunan sebagai berikut :

Pendapatan Pembangunan Tahun Anggaran 1982/1983 sebesar Rp. 543.532.870,- meningkat menjadi Rp. 1.048.133.870,- yang berarti ada kenaikan sebesar Rp. 504.601.000,- atau 92,84 %.

Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1982/1983 sebesar Rp. 823.095.680,- meningkat menjadi Rp. 1.965.078.030 yang berarti ada kenaikan sebesar Rp. 1.141.982.350,- atau 138,74 %.

#### V. Masalah Rutin.

Sesuai dengan uraian terdahulu kami mengambil suatu tekad kebijaksanaan untuk benar-benar meningkatkan pendapatan rutin, khususnya Pendapatan Asli Daerah, sedang untuk belanja rutin yang nampak adanya kenaikan adalah karena adanya peningkatan kegiatan pelayanan masyarakat dan sebagai pendukung adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam hal ini dapat kami berikan gambaran sebagai berikut :

Pendapatan Rutin Tahun Anggaran 1982/1983 sebesar Rp. 2.868.846.770,- meningkat menjadi Rp. 4.047.731.630,- yang berarti ada kenaikan sebesar Rp. 1.178.884.860,- atau 41,09 %.

Belanja Rutin Tahun Anggaran 1982/1983 sebesar Rp. 2.589.283.960,- meningkat menjadi Rp. 3.130.787.470,- yang berarti ada kenaikan sebesar Rp. 541.503.510,- atau 20,91 %.

#### VI. Sebagai Gambaran perangkaan lebih lanjut setelah adanya pembahasan Panitia Anggaran DPRD adalah sebagai berikut :

A. Gambaran RAPBD TA 1983/1984.

U r a i a n	TA 1982/1983	T. 1983/1984	%
<u>R U T I N :</u>			
a. Pendapatan	2.868.846.770	4.047.731.630	141,09
b. Belanja	2.589.283.960	3.130.787.470	120,91
Tabungan Pemerintah	279.562.810	916.944.160	327,99
<u>PEMBANGUNAN :</u>			
a. Pendapatan	543.532.870	1.048.133.870	192,84
b. Belanja	823.095.680	1.965.078.030	238,74
<u>VOLUME APBD</u>	<u>3.412.379.640</u>	<u>5.095.865.500</u>	<u>149,33</u>

B. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

BIDANG	APBD TA 1982/83	RAPBD TA 1983/84	%
R u t i n	1.227.081.410	2.306.394.270	187,96
Pembangunan	59.532.870	1.623.870	2,73
	1.286.614.280	2.308.018.140	179,39

Jadi ada kenaikan sebesar Rp. 1.021.403.860,- atau kalau dihitung dalam prosentase berarti ada kenaikan sebesar 79,39 %.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan diiringi permohonan maaf atas segala kekurangan-kekurangannya, dengan ini kami sampaikan Nota Keuangan RAPBD TA 1983/1984 berikut lampiran-lampirannya yang berupa Buku RAPBD TA 1983/1984 beserta ralatnya serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1983/1984 sbb. :

.....  
 Akhirnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Dewan yang terhormat atas kerja sama yang serasi dan mantap dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintah di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Semoga Tuhan Yang Mahaesa selalu melimpahkan taufiq dan hidayahNya kepada kita sekalian dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Mei 1983.



ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 YOGYAKARTA,

( SOEGIARTO ).

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

NOMER : TAHUN 1983

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang No.16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kotabesar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Ja-  
wa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerih-  
tahan di Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,  
Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyus-  
unan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan  
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Ang-  
garan Pendapatan dan Belanja Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang  
Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be-  
lanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan  
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da-  
erah;  
6. Surat Menteri Dalam Negeri No.903/2109/SY tanggal 26 Pebru-  
ari 1983 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984;  
7. Surat Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No.  
903/546 tanggal 2 April 1983 tentang Pedoman Penyusunan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
8. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Yogyakarta No. : 1/K/DPRD/1979 tentang  
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ko-  
tamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- MENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal :  
2. Pembicaraan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Da-  
erah tanggal :

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-  
rah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran  
1983/1984.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 sebesar Rp. 5.095.865.500,-

( Lima milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah ).

a. Pendapatan :

R u t i n

Rp. 4.047.731.630,-

Pembangunan

Rp. 1.048.133.870,-

----- Rp. 5.095.865.500,-

b. Belanja :

R u t i n

Rp. 3.130.787.470,-

Pembangunan

Rp. 1.965.078.030,-

----- Rp. 5.095.865.500,-

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

R u t i n

Rp. 375.287.450,-

Pembangunan

Rp. 1.115.783.000,-

----- Rp. 1.491.070.450,-

b. Belanja :

R u t i n

Rp. 375.287.450,-

Pembangunan

Rp. 1.115.783.000,-

----- Rp. 1.491.070.450,-

Pasal 3.

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A. II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1983.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta,  
Ketua,

Kepala Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta,

( PRODJOWIDJONO ).

( SOEGIARTO ).

12/1983.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
Y O G Y A K A R T A

---



Arsip DPK Kota Yogyakarta

JAWABAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK II YOGYAKARTA  
ATAS PANDANGAN UMUM KE I FRAKSI-FRAKSI  
MENGENAI  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1983/1984

---

JAWABAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
ATAS PANDANGAN UMUM KE I FRAKSI-FRAKSI MENGENAI  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1983/1984

---

Yth. Saudara Ketua Sidang dan Pimpinan Dewan,  
Yth. Saudara-saudara Anggota MUSPIDA,  
Yth. Saudara-saudara Anggota DPRD,  
Yth. Saudara Sekretaris, Sekretaris Dewan, Assisten Sekretaris,  
Saudara Kepala Bagian/Dinas/Jawatan, Camat, Saudara Wartawan dan hadirin  
sekalian.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahaesa atas Rakhmat dan karuniaNya, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam Sidang Pleno DPRD sebagai kelanjutan Sidang terdahulu, dalam rangkaian pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Sidang yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum ke I Fraksi-Fraksi yang pada prinsipnya bertujuan untuk menyempurnakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini. Saran, Pertimbangan dan sumbangan pemikiran dari Fraksi-Fraksi dalam Pandangan Umum tersebut, akan kami pergunakan sebagai pedoman untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Program Pembangunan di Kotamadya Yogyakarta.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan tanggapan dan tambahan penjelasan secara terperinci, namun tidak kami susun Fraksi demi Fraksi akan tetapi kami susun menurut pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Secara umum kami menyampaikan terima kasih kepada Fraksi-fraksi yang telah memahami kebijaksanaan yang kami ambil dalam Tahun Anggaran 1983/1984 ini dan memberikan dukungan serta kesediannya untuk turut serta mengamankan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut.
2. Kami menyadari bahwa kami tidak akan dapat melaksanakan Program dan kebijaksanaan yang kami ambil dalam Tahun Anggaran 1983/1984 ini tanpa ada dukungan dari Legislatip maupun masyarakat. Untuk ini kami mengharapkan adanya peningkatan kerja sama yang serasi, baik dalam lingkungan Pemerintah sendiri maupun dengan masyarakat.
3. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 sudah kami laksanakan sejak jauh sebelumnya sesuai dengan permintaan Dewan, yang menurut catatan kami sejak tanggal 30 Maret 1983 Eksekutif sudah mulai membahas bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD.

Kami memaklumi sepenuhnya bahwa dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ini baik Fraksi-fraksi maupun Komisi-komisi merasa kekurangan waktu untuk berkomunikasi, dikarenakan keterlambatan penyampaian Pra Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Panitia Anggaran DPRD. Namun demikian harap dinaklumi bahwa mekanisme yang kita gunakan sekarang ini ternyata memerlukan waktu yang cukup panjang, sebab kami harus melayani permintaan Panitia Anggaran dan Komisi-komisi disamping masih harus mematangkan usulan dari Dinas-Dinas yang belum dapat terselesaikan.

4. Rencana kenaikan pendapatan yang cukup besar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah prestasi kita bersama, dan kami berpendapat untuk terwujudnya Rancangan Anggaran tersebut sangat tergantung pada tanggung jawab kita bersama. Karenanya melalui Sidang Dewan yang terhormat ini, kami harapkan ditingkatkannya peran Dewan sebagai partner Eksekutif.
5. Dalam merencanakan belanja rutin Eksekutif benar-benar telah berusaha untuk mengadakan penghematan-penghematan, sedang penambahan belanja rutin pada beberapa pasal mempunyai maksud diarahkan untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan frekwensi kegiatan pelayanan masyarakat.  
Dengan demikian kami sependapat dengan pandangan bahwa penghematan tidak diartikan pengecilan angka yang akan mengakibatkan pengecilan tingkat penurunan efisiensi dan pengabdian.
6. Sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh Irjen Depdagri pada bulan April 1983 dijelaskan bahwa Bagian-bagian dalam Sekretariat Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan kerja, oleh karena itu dalam pembuatan Anggarannya harus digabungkan menjadi satu. Akibat dari hal tersebut maka pasal-pasal dari folio 29 sampai dengan folio 44 menjadi kosong dimasukkan menjadi satu pada Pos 2.2.3 Sekretariat Kotanadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.  
Sedangkan kekosongan pada beberapa pasal yang berkode nomor 1053 mengenai pemeliharaan kendaraan bermotor karena akibat adanya Rencana pooling dan penghapusan kendaraan-kendaraan dinas.
7. Berdasarkan Lampiran I Surat Menteri Dalam Negeri Nomer 903/2109/SJ Tanggal 26 Pebruari 1983 tentang Pedoman Tehnik Penyusunan Anggaran Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 Butir A.4. yang menyebutkan bahwa Target atas bagian laba dari Perusahaan Daerah harus ditetapkan sebesar Bagian laba berdasarkan Neraca Tahun Fiskal sebelumnya, sehingga :

- Untuk bagian laba dari Bank Pasar Tahu 1982 seharusnya dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984, akan tetapi bagian laba tersebut telah dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983, dengan demikian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 tidak dimasukkan lagi.
- Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 tidak dicantumkan Bagian laba dari PD AM Tirta Marta, dikarenakan dalam Tahun 1982 Perusahaan tersebut mengalami kerugian.

Sedangkan Deviden Bank Pembangunan Daerah DIY Tahun fiskal 1982 sudah diterima pada Bulan Maret 1983 sebesar Rp. 2.177.445,01 yang nantinya akan dapat terlihat didalam Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983.

Dengan demikian tidak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984.

8. Biaya operasional tersebut folio 28 pasal 2.2.3.1099 tidak khusus untuk keperluan Bagian Keuangan saja, melainkan termasuk juga Bagian Perekonomian, adapun masing-masing semula dari pasal 2.2.3.C.1099 dan pasal 2.2.3.D.1099.  
Yang menyangkut Bagian Keuangan dipergunakan untuk :
  - a. Biaya pembinaan administrasi Keuangan.
  - b. Biaya konsultasi pengelolaan keuangan.
  - c. Biaya kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian Pra Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pra Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pra Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - d. Biaya pengolahan data administrasi Keuangan Daerah, penyajian data, statistik, grafik dan lain-lain.
9. Peningkatan pengawasan agar mencapai hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kualitas maupun kuantitasnya adalah merupakan salah satu kebulatan tekad Eksekutif, untuk itu diharapkan peran serta Legislatif melalui Komisi-komisi yang bersangkutan.
10. Saran untuk meningkatkan Pajak Pembangunan I telah mendapatkan perhatian Eksekutif, kini sedang dirintis pendataan kembali sebagai dasar perhitungan penentuan Pajak Pembangunan I yang mendekati kebenaran.
11. Pada saat ini untuk menangani Pajak Tontonan di 13 Gedung Bioskop Dipenda baru mempunyai 16 orang petugas luar, sedang untuk menangani Pajak Pembangunan I baru mempunyai 8 orang petugas luar.



12. Saran mengenai penggunaan dana intensifikasi agar lebih diutamakan bagi petugas lapangan tanpa melupakan pihak-pihak lain yang mendukung, telah sejalan dengan kebijaksanaan Eksekutif.
13. Secara macro untuk mengalokasikan program pembangunan, Eksekutif telah berusaha mendasarkan pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi sebenarnya sistim kerja yang dilaksanakan saat ini sudah plan matang. Namun demikian kami sependapat bahwa sistim kerja ini perlu ditingkatkan antara lain dengan menyusun Repelita IV Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
14. Masalah perimbangan yang dirasa belum memadai antara kualitas dan kuantitas dengan indeks harga satuan secara wajar, akan ditangani dengan meningkatkan pengendalian dan pengawasan, baik pada kegiatan perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan petunjuk atau pedoman dari Pemerintah Atasan.
15. Tentang pengutamakan proyek yang besar-besar dan monumental, serta peningkatan kualitas, kami sependapat, namun untuk proyek-proyek yang kecil-kecil yang bermanfaat juga perlu diperhatikan.
16. Tentang pembuatan buku-buku seperti Evaluasi/Review Kegiatan Pelita, Hasil sensus Ekonomi Nasional, Yogyakarta dalam angka, Bappeda akan selalu bekerja sama dengan Instansi-instansi yang berkompeten, khususnya Kantor Statistik.
17. Dalam mempersiapkan pelaksanaan Kepres No. 5/1983 Eksekutif telah mempersiapkan inventarisasi kendaraan dinas yang terdiri dari roda empat sebanyak 108 buah dan roda dua sebanyak 79.  
Dari jumlah tersebut yang direncanakan untuk pool roda empat di kompleks Timoho sebanyak 28 buah, pool di dinas/unit kerja ( Kesehatan, Pekerjaan Umum, Peternakan, Pertanian, Jawatan Pasar, PBK, PD AM ) sebanyak 39 buah.  
Jumlah kendaraan roda empat yang direncanakan akan dijual sebanyak 41 buah termasuk yang sudah rusak sebanyak 10 buah. Dan kendaraan roda dua yang dapat dijual sebanyak 73 buah, dan yang akan di pool sebanyak 6 buah.
18. Pembelian pesawat Facsimile sudah menjadi ketentuan dari Departemen Dalam Negeri dalam rangka menjamin kelancaran komunikasi. Saran atas pengelolaan pesawat tersebut dapat kami pahami dan kami perhatikan.
19. Pemerintah Kelurahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan antara lain telah aktif dalam kegiatan LKMD dan PKK, Lomba Desa, pungutan Ipeda, pengelolaan administrasi kependudukan, pembaharuan KTP, pelaksanaan kebersihan lingkungan dan tugas-tugas lain yang digariskan Pemerintah Atasan.

Untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan perangkat Kelurahan agar lebih berdaya guna, akan diadakan penataran sesuai dengan petunjuk Pemerintah Atasan.

20. Eksekutif telah memperhatikan Kantor Agraria agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan income Daerah. Dalam pasal 2P.3.1.01.2.001 proyek penyempurnaan Kantor Balai Kota Timoho, termasuk untuk memperluas ruang tunggu Kantor Agraria. Demikian pula direncanakan pembangunan Kantor Juru Kunci kuburan Sariloyo dan Utoroloyo tersebut pasal 2P.3.1.01.2.008-a. Sedang mengenai kesejahteraan Karyawan Kantor Agraria diberikan insentif dalam Tahun Anggaran 1982/1983 3% dari pendapatan dan untuk Tahun Anggaran 1983/1984 akan dinaikan menjadi 5%.
21. Dalam menyongsong GMT sesuai dengan pengarahannya Panitia GMT Propinsi DIY tiap-tiap Daerah Tingkat II diharapkan menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya untuk penyuluhan, keamanan dan promosi Industri Pariwisata. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 ini tercermin pada pasal 2P.3.1.03.1.002 sebesar Rp. 750.000,- Pengeluaran untuk pasal tersebut sedang dalam proses.
22. Tentang bangunan kios petak THR Sasono Suko kaitannya dengan pendapatan Daerah dapat kami jelaskan sebagai berikut :  
Memang benar berdasarkan penetapan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 26 Th. 1965 pasal 6 ayat 4 dipungut biaya pemeliharaan bangunan sebanyak Rp. 10.000,- tiap bulan.  
Pada saat itu bersamaan dengan keluarnya kebijaksanaan moneter berupa "Sanering" nilai nominal Rp.1.000,- menjadi Rp. 1,- ditambah lagi adanya keengganan masyarakat untuk menempati bangunan Kios bekas Kuburan sehingga minat masyarakat sangat tipis, maka Pemerintah Kotamadya tidak melaksanakan pungutan tersebut.
23. Telepon Kantor THR adalah milik Pemerintah Kotamadya, oleh karena aktivitasnya sementara ini sangat kurang maka telah direncanakan untuk dicabut dan telah dihapuskan dari Anggaran 1983/1984.
24. Eksekutif sependapat dengan Panitia Anggaran tentang pemusatan Perpustakaan di Lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan dalam hal ini telah dirintis pelaksanaannya.

25. Jumlah Pegawai/Tenaga Kerja pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebanyak :

- Pegawai	=	1.558	orang
- PP. 31/1954	=	704	orang
- Tenaga Honorer	=	330	orang
- Pekerja Harian Lepas	=	436	orang

Jumlah Keseluruhan 3.028 orang

Sidang Dewan yang kami hormati.

Demikianlah tanggapan dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum ke I Fraksi-fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984, kiranya dapat menjadi tambahan bahan pertimbangan dalam Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 menjadi Peraturan Daerah.

Akhirnya apabila terdapat kekurangan didalam kami menyampaikan tanggapan dan tambahan penjelasan hendaknya dapat dimaafkan.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 1983.



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK II  
YOGYAKARTA

t t d .

S O E G I A R T O )

13/1983

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
Y O G Y A K A R T A

---



Arsip DPK Kota Yogyakarta

JAWABAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK II YOGYAKARTA  
ATAS PANDANGAN UMUM KE II FRAKSI-FRAKSI

MENGENAI

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1983/1984

---

JAWABAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ATAS PANDANGAN UMUM II FRAKSI-FRAKSI MENGENAI

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 1983/1984

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang dan Pimpinan Dewan,  
Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Muspida,  
Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Dewan,  
Yang terhormat Saudara Sekretaris Kotamadya, Sekretaris Dewan, Asisten  
Sekretaris, Kepala-kepala Itwilko, BAPPEDA, Bagian, Dinas, Jawatan, Perusa-  
haan Daerah dan Para Camat,  
Rekan-rekan Wartawan serta hadlirin sekalian yang terhormat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadlirat Tuhan Yang Mahaesa atas Rakhmat dan karuniaNya sehingga pada malam hari ini kita diperkenankan bertemu kembali dalam Rapat Pleno DPRD dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk bersama-sama membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984.

Kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Sidang atas kesempatan yang di-  
berikan kepada kami, untuk menyampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan  
Umum ke II Fraksi-fraksi mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tahun Anggaran 1983/1984.

Tidak lupa ucapan terima kasih ini kami sampaikan pula kepada Fraksi-fraksi  
yang lewat para Juru bicaranya masing-masing telah memberikan tanggapan ba-  
ik berupa pertanyaan-pertanyaan maupun saran-saran atas Jawaban Eksekutif  
dalam Pandangan Umum I Fraksi-fraksi pada tgl. 21 Mei 1983 yang lalu.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Atas pertanyaan-pertanyaan, saran dan himbauan yang telah disampaikan, akan  
kami berikan tanggapan sejauh yang kami pandang perlu untuk lebih memperje-  
las. Ini tidak berarti bahwa apa yang tidak kami tanggapi akan kami abaikan.  
Kesemuanya akan tetap kami perhatikan dan akan kami laksanakan sesuai de-  
ngan kemampuan yang ada.

Adapun tanggapan yang kami pandang perlu adalah sebagai berikut :

1. Mengenai kolom-kolom yang kosong pada folio 22 sampai dengan folio 28  
perlu kami tambahkan penjelasan, bahwa pengetrapan sistem tersebut telah  
mendasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11/1975 disamping  
kami wajib mematuhi saran Irjen Depdagri sewaktu melakukan pemeriksaan  
pada bulan April yang lalu.

2. Pendapat tentang penghematan dikaitkan dengan dianggarkannya biaya-biaya Hari-hari Besar Nasional, HUT, Pembinaan Olah Raga dan Pertasigana kami jelaskan bahwa hal ini bukan hanya berarti biaya untuk upacara-upacara saja tetapi penggunaan nantinya akan diarahkan antara lain untuk :
  - Eksposisi pembangunan.
  - Meningkatkan jiwa patriotisme.
  - Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.
  - Membina atlit-atlit kita yang dapat mencapai prestasi baik dan dapat membawa nama baik Kota Yogyakarta.Kesemuanya berkaitan erat dengan pembangunan manusia seutuhnya baik mental spiritual maupun fisik materiil.
3. Mengenai biaya pemeliharaan kendaraan Tahun Anggaran 1982/1983 sebesar Rp. 71.796.190,- dan sekarang sebesar Rp. 63.351.900,- memang kelihatannya tidak banyak pengurangannya bila dibanding dengan menyusutnya jumlah kendaraan akibat pelaksanaan Kepres 5/1983. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan bakar sekitar 33 % untuk premium dan 163 % untuk Solar. Sedangkan dari jumlah Rp. 63.351.900,- tersebut yang dipergunakan untuk P.U dan PBK meliputi sebesar Rp. 33.826.750,-
4. Lampiran-lampiran sebagai kelengkapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 akan kami sampaikan dalam sidang Panitia Penyimpul. Atas keterlambatan penyampaiannya kami minta maaf.
5. Dalam rangka intensifikasi pungutan pajak kendaraan tidak bermotor, akan kami tempuh dengan menugaskan Perangkat Kelurahan langsung kepada masing-masing wajib pajak, kiranya sistim ini sekaligus dapat mengatasi cara-cara pemungutan yang dipandang kurang etis.
6. Masalah penganggaran pajak radio, Eksekutif masih berpendapat tetap dicantumkan UP karena dasar hukumnya sampai saat ini belum dicabut.
7. Tentang penjualan karcis-karcis diluar loket Terminal sedang kami usahakan langkah-langkah penertiban, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang ada dan bekerja sama dengan instansi yang berkaitan.
8. Peraturan Daerah No9/1982 adalah Peraturan Daerah tentang Retribusi Kios Pasar, dengan demikian tidak dapat diperlakukan di Terminal Bis. Retribusi Kios di Terminal Bis telah diatur dalam Peraturan Daerah No4/1981 tentang Stasiun Bis; apabila dipandang Retribusi Kios di Terminal Bis masih rendah maka satu-satunya jalan adalah merubah Peraturan Daerah No4/1981.
9. Saran tentang biaya Intensifikasi Pendapatan Daerah agar diletakan dalam pasal lain; Kami sependapat dan akan dicantumkan dalam pos 2.2.4. pasal 1100.

10. Eksekutif sependapat dilaksanakannya peninjauan kembali atas kontrak-kontrak dan peraturan-peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini sepanjang hal tersebut dipandang perlu.

Adapun mengenai :

- RPD tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kodya Dati II Yogyakarta sudah disampaikan kepada Dewan, dengan demikian proses selanjutnya kami serahkan kepada Dewan.
- RPD tentang tatacara pengambilan sumpah dan janji Lurah sudah dipersiapkan dan dalam waktu dekat akan kami sampaikan kepada Dewan.
- RPD tentang pembentukan lingkungan sedang kami persiapkan sesuai dengan Undang-undang No. 5/1979. Sedangkan usulan tentang batas Kelurahan sedang dalam pembahasan dan penelitian dilapangan.

Sebagai langkah-langkah penyempurnaan atas Peraturan-peraturan Daerah yang berkaitan ekstensifikasi pendapatan Daerah kami sependapat untuk diadakan peninjauan kembali.

Sedangkan RPD yang sekarang ini sudah disampaikan kepada Dewan, proses selanjutnya kami serahkan kepada Dewan.

11. Saran untuk menempatkan Gedung SD dilokasi yang memadai sebenarnya sudah sesuai dengan pendapat Eksekutif. Akan tetapi berhubung keterbatasan lahan akibat perkembangan kota maka sering dijumpai hal-hal yang kurang pada tempatnya.

Pembangunan Gedung baru SD Inpres Tahun Anggaran 1982/1983 yang tidak disediakan biaya pembebasan tanahnya terpaksa kami serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 1983/1984 tidak tersedia lagi dana untuk Pembangunan Gedung baru SD Inpres, karena untuk sementara waktu dipandang sudah mencukupi.

Saran mengenai penertiban tanah-tanah Pemerintah/bagi hasil dan adanya penghunian liar diatas tanah-tanah tersebut sudah mulai dilaksanakan oleh Eksekutif bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

12. Saran agar segera diadakan rencana Pola Umum Angkutan Kota sangat kami perhatikan. Untuk menyusun rencana tersebut saat ini baru dirintis langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pembangunan Sub terminal di pinggiran kota.
- b. Koordinasi dengan Dati II sekitar tentang titik singgung angkutan kota dan angkutan pedesaan.
- c. Kebijakan tentang pengaturan becak.
- d. Pengaturan tempat parkir.
- e. Kebijakan pengaturan kendaraan berat antar daerah yang mestinya tidak diperbolehkan lewat jalan-jalan dalam kota.

Masalah-masalah tersebut diatas merupakan sarana pendukung dalam penyusunan rencana Pola Umum Angkutan Kota.

13. Penyuluhan kepada masyarakat menghadapi GMT tanggal 11 Juni 1983 yang akan datang Panitia GMT telah melaksanakan kegiatan penyuluhan baik melalui media elektronik maupun media cetak, yang sampai saat ini telah dicetak <sup>20.000 selabara</sup> 8.000 ~~brsur~~ untuk menjangkau sampai kepada Kepala Keluarga. Disamping itu oleh Jupen Kecamatan juga telah disampaikan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Makin dekatnya hari peristiwa tersebut penyuluhan akan lebih diintensipkan.
14. Sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan kota, Eksekutip memang telah memberikan sambutan baik terhadap PT SIRNA SAMPAH yang bergerak dalam usaha pemushahan sampah secara mekanis. Yaitu dengan memberikan fasilitas berupa lokasi, los dan rumah jaga di Dongkelan untuk melakukan kegiatannya selama 6 bulan. Kesulitan yang sekarang dijumpai oleh PT SIRNA SAMPAH adalah masalah penyambungan aliran listrik karena memerlukan kapasitas 35.000 KVA, berarti harus mendapat izin khusus dari Semarang. Berhubung kenyataan PT SIRNA SAMPAH tersebut masih dalam tarap percobaan maka Eksekutip masih tetap memandang perlu penyediaan dana guna pengadaan belt.
15. Seperti kita maklumi bersama bahwa PD Air Minum Tirtamarta merupakan suatu Perusahaan yang mengemban dua tugas yang saling berlawanan arah yaitu :  
memupuk pendapatan Daerah disatu pihak dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dilain pihak dengan tarip langganan yang rendah. Akan tetapi bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang air bersih dengan persediaan cukup melimpah dan harga yang rendah, kiranya merupakan hal yang tidak mudah dan tidak dapat secara cepat untuk dilaksanakan.  
Maka dari itu terlepas dari kemampuan pihak Pengelola, pengaruh faktor alam dan gejolak kenaikan harga bahan-bahan, kiranya ada satu hal yang perlu mendapat perhatian kita yaitu :  
- Bagaimana cara kita bersama untuk turut menentukan dan menjaga keseimbangan antara kedua tugas tersebut diatas.  
Mengenai pendapat, bahwa keuntungan Umbang Tirta tidak pernah bermanfaat bagi Pemda karena digunakan untuk menopang kerugian PD Air Minum Tirtamarta adalah tidak benar, karena pengelolaan Perusahaan tetap berdiri sendiri-sendiri, masing-masing menyetorkan bagian laba Perusahaan kepada Kas Daerah.  
Tambahannya income Umbang Tirta dari adanya Kios baru, nanti akan terlihat jelas pada Tahun Anggaran 1983/1984, karena untuk waktu sebelumnya diperhitungkan dengan biaya pembuatan/pendirian Kios-kios tersebut.



16. Untuk mengatasi genangan air akibat terganggunya saluran irigasi tertier dan saluran air hujan sangat kami perhatikan sepanjang masalah tersebut menjadi wewenang Tingkat I akan kami usahakan konsultasi dan kerja sama. Sedang apabila masalah tersebut menjadi wewenang Kotamadya akan kami atasi baik dengan mempergunakan tenaga PU maupun dengan gerakan kerja bakti.
17. Usaha untuk meningkatkan Kebun Bibit pertanian dan buah-buahan telah kami perhatikan dengan menyediakan dana pembangunan sebesar Rp. 7.500.000,- untuk keperluan usaha pengadaan macam-macam bibit yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan.
18. Memang benar bahwa comersialspace yang akan laku pada Tahun Anggaran 1983/1984 belum tercermin dalam RAPBD, namun demikian itu tidak berarti bahwa Eksekutip tidak akan berusaha untuk mengisi comersial space yang saat ini masih kosong.  
Untuk itu direncanakan pemindahan pasar sepeda Pakualaman, pasar meubel sederhana dan pedagang kaki lima dari beberapa tempat.
19. Sesuai dengan jawaban kami pada Panung an Umum I bahwa mengenai bagian Laba Bank Pasar hanya akan mengalami kekosongan pada Tahun Anggaran 1983/1984, sedang pada Tahun Anggaran 1984/1985 dan seterusnya akan selalu isi sepanjang Bank Pasar tidak mengalami kerugian.  
Sedang mengenai deviden BPD DIY untuk tahun-tahun selanjutnya akan dicantumkan sesuai dengan pemberitahuan resmi dari BPD DIY.
20. Sesuai dengan jawaban Eksekutip No. 14 halaman 4 maka Eksekutip bertekad dan berusaha keras untuk meningkatkan kualitas dengan meningkatkan pengendalian dan memperketat pengawasan, antara lain dengan cara menertibkan administrasi, pengawasan teknis serta lebih memfungsikan eksaminasi perencanaan dan pelaksanaan proyek.  
Mengenai penggebalan rumput yang benar adalah Rp. 500,- per m<sup>2</sup>.  
Adapun luasnya adalah 4.000 m<sup>2</sup> dengan biaya Rp. 2.000.000,- sedang lokasinya tidak hanya jalan Gejayan, tetapi termasuk juga jalan Jenderal Sudirman sebagaimana tersebut pada folio 24 pasal 2P.2.2.02.1. 004.
21. Tentang pemilihan prioritas proyek, dalam penyusunan RAPBD TA 1983/1984 ini, sebetulnya telah melalui proses yang cukup panjang, yaitu dimulai sejak dilaksanakannya "Konsultasi Intern BAPPEDA" pada pertengahan tahun 1982, yang mengikut sertakan Instansi-instansi Daerah maupun Vertikal.
22. Proyek-proyek survey dan penelitian yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 1983/1984 ini telah ditekan sedemikian rupa sehingga betul-betul hanya dipergunakan untuk operasional dan pengadaan sarana serta penggandaan hasilnya.

23. Masalah proyek-proyek yang sebenarnya dapat dikerjakan secara rutin, kami sependapat apabila kelak pada Tahun Anggaran 1984/1985 dimasukkan dalam anggaran rutin. Untuk Tahun Anggaran 1983/1984 ini Eksekutif berpendapat tetap masuk Anggaran Pembangunan, karena masih merupakan kegiatan baru.
24. Untuk mengatasi masalah penerangan jalan, Eksekutif telah mengadakan kerjasama dengan PLN dan setiap hari Sabtu diadakan rapat kordinasi untuk membicarakan permasalahan yang timbul.
25. Tentang saran agar memperhatikan tempat-tempat bersejarah agar dimonumenkan, kami perhatikan. Untuk itu Eksekutif akan mulai berusaha menginventarisir lebih dahulu.
26. Saran peningkatan usaha pemberantasan kemaksiatan di Kota Yogyakarta adalah sejalan dengan kebijaksanaan Eksekutif.  
Adapun usaha penanggulangan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
  - a. Telah dilaksanakan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan narkoba termasuk minuman keras kepada pelajar melalui OSIS dan BP 3 oleh BAKOPPAR bersama Kanwil Departemen P & K.
  - b. Mengadakan operasi secara rutin terhadap penjual minuman keras dan Toko Obat yang menjual obat-obat terlarang oleh BAKOPPAR bekerjasama dengan Kepolisian.
  - c. Juga telah dilaksanakan pengawasan terhadap tempat praktek tunasusila dari kunjungan para remaja oleh BAKOPPAR bekerja sama dengan Pihak Kepolisian.
  - d. Masalah SIP dan SIM telah ditangani oleh KEJARI yang dalam hal ini juga sebagai anggota BAKOPPAR. Dan kepada pencetaknya telah diambil tindakan.

Disamping itu dalam rangka memberikan kegiatan pada waktu luang kepada remaja telah diadakan pembinaan antara lain olahraga, pendidikan mental, ketrampilan melalui Karang Taruna yang saat ini sudah terbentuk 25 Karang Taruna diwilayah Kotamadya Yogyakarta.

Untuk menangani masalah minuman keras perlu mendapat dukungan Peraturan Daerah yang memadai.

Agar lebih berhasilnya penanggulangan masalah-masalah tersebut diatas partisipasi aktif dari seluruh masyarakat benar-benar sangat diharapkan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah tambahan keterangan dan jawaban kami atas Pandangan Umum ke II Fraksi-fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 semoga dapat menambah keterangan dan kejelasan dalam menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 ini menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kepada Fraksi-fraksi yang telah menyatakan dapat menerima maupun yang tidak keberatan ditetapkannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini menjadi Peraturan Daerah, kami ucapkan te rima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya apabila didalam menyampaikan jawaban ini terdapat kekurangan, kekhilafan maupun hal-hal yang tidak berkenan dihati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Sekian dan terima kasih.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Yogyakarta, 23 Mei 1983.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA,

ttd.

( S O E G I A R T O ).



Arsip DPK Kota Yogyakarta

RANCANGAN

KESIMPULAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA TANGGAL 26 MEI 1983

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN  
1983 / 1984

Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada tanggal 18,20,21,23 dan 26 Mei 1983.

Setelah mendengar :

1. Usul Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta dalam Kata Pengantar mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1983/1984 dan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi;
2. Pendapat Fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang disampaikan dalam Pandangan Umum ;

mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- I. Menerima baik usul Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1983/1984 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor Tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1983/1984 sebagaimana terlampir.
- II. Menyampaikan saran-saran kepada Walikotamadya Kepala Daerah sebagai berikut :
  1. Penggunaan Alokasi Pemeliharaan Jalan (Rutin)  
Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna alokasi dana yang tersedia, maka pemeliharaan jalan Tahun Anggaran 1983/1984 agar dilaksanakan dengan Swakelola.
  2. Pemasangan Pirolisator
    - a. Perlu ditinjau kembali lokasi yang akan digunakan sebagai tempat Pirolisator.
    - b. Agar pemanfaatan Pirolisator tetap berlandaskan asas penghematan daya guna, tepat guna dan hasil guna.
    - c. Agar rencana pengelolaan Pirolisator dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komisi yang bersangkutan.
  3. Proyek-proyek Jalan  
Untuk mendapatkan perhitungan yang lebih pasti dan untuk pemanfaatan dana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka sebelum proyek-proyek jalan dilaksanakan agar dilakukan perhitungan ditempat (Opname) terlebih dahulu.
  4. Pendayagunaan tenaga Karyawan  
Agar kekurangan tenaga Karyawan antara lain di Bappeda dan Dipenda segera mendapat perhatian.
  5. Terminal Bus dan THR
    - a. Retribusi Kios / Loket di terminal Bus yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1981 dan Retribusi Kios-kios di THR yang diatur dalam Penetapan Walikota Kepala Daerah Nomor 26 / 1965 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan oleh karenanya perlu ditinjau kembali dan disempurnakan.

- b. Penggunaan Kios dan Locket di Terminal Bus agar ditertibkan sesuai dengan Peraturan Daerahnya.
6. Intensifikasi Pasar dan Usaha-usaha Daerah
    - a. Comersial Space dibeberapa pasar yang belum dipergunakan sebagaimana mestinya agar mendapat pengamatan dan terus diusahakan sehingga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.
    - b. Untuk lebih meningkatkan pengelolaan Perusahaan-perusahaan / Badan Usaha Daerah dan untuk mengatasi kemungkinan rugi yang terus menerus, maka management Perusahaan-perusahaan Daerah/ Badan-badan Usaha Daerah agar dikelola berdasarkan asas profesionalisme.
  7. Perencanaan Pembangunan

Untuk lebih memantapkan Perencanaan Pembangunan agar segala hambatan dalam mekanisme perencanaan diatasi dengan segera.
  8. Data Jalan-jalan

Untuk melengkapi perencanaan Pembangunan data jalan-jalan di Kotamadya yang sekarang telah ada agar disempurnakan.

Yogyakarta, 26 Mei 1983  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta

K e t u a :

PRODJOWIDJONO.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

NOMER TAHUN 1983

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- MENIMBANG** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kotabesar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/2109/SJ tanggal 26 Pebruari 1983 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984;
7. Surat Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 903/546 tanggal 2 April 1983 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984;
8. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. : 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- MENDENGAR** : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal : 30 Maret; 6 dan 8 April; 11, 13, 14, 15, 16 dan 17 Mei 1983;
2. Pembicaraan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 18, 20, 21, 23 dan 26 Mei 1983.
- DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA**
- M E M U T U S K A N** :
- MENETAPKAN** : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1983 / 1984.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 sebesar Rp. 5.095.865.500,-

( Lima milyar sembilan puluh lima juta delapan ratus enampuluh lima ribu lima ratus rupiah ).

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 4.047.731.630,-	
Pembangunan	Rp. 1.048.133.870,-	
	-----	Rp. 5.095.865.500,-

b. Belanja :

Rutin	Rp. 3.132.427.470,-	
Pembangunan	Rp. 1.963.438.030,-	
	-----	Rp. 5.095.865.500,-

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 375.287.450,-	
Pembangunan	Rp. 1.115.783.000,-	
	-----	Rp. 1.491.070.450,-

b. Belanja :

Rutin	Rp. 375.287.450,-	
Pembangunan	Rp. 1.115.783.000,-	
	-----	Rp. 1.491.070.450,-

Pasal 3.

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1983.

Ditetapkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 26 Mei 1983.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta,  
Ketua,

Kepala Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta,

( PRODJOWIDJONO )

( SOEGIARTO )

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tanggal : .....  
Nomor : .....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor . . . . . Tanggal . . . . .  
Seri . . . . .

Sekretaris Wilayah/Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Yogyakarta